

PROFESIONALISME CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN NABIRE BARAT KABUPATEN NABIRE

Yosua Kogoya¹
Ventje Kasenda²
Neni Kumayas³

Abstrak

Profesionalisme camat dalam penyelenggaraan pemerintah di kecamatan nabire barat kurang berjalan dengan baik hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan camat baik didalam skil-skil kuhsus maupun yang semestinya dikuasai sebagai tugas pokok camat tidak berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana profesionalisme camat dalam penyelenggaraan pemerintahan kususnya di kecamatan nabire barat kabupaten nabire. Hasil penelitian menunjukan bahwa camat kurang mampu menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan nabire barat dalam hal ini menyangkut pengurusan administrasi seringkali dilakukan diruma camat karena kurangnya kehadiran camat, penggunaan anggaran yang hanya habis dibelanja rutin kecamatan tanpa adanya melakukan pelatian-pelatian kusus buat ibu-ibu pkk dan kegiatan lainya yang sudah menjadi tugas pokok camat, secara terperinci kesimpulan mengenai aspek-aspek yang di kaji berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan camat kurang profesional kususnya menjalankan tugas-tugas pokok sebagai camat.

Kata Kunci : Profesionalisme, Camat, Dalam Pemerintahan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Perubahan kedudukan kecamatan dan kedudukan camat, membawa dampak yang harus dijalani oleh camat. Namun demikian ada karakter yang berbeda antara status perangkat daerah yang ada pada kecamatan dengan instansi/lembaga teknis daerah. Bila ditelaah lebih lanjut kewenangan camat justru lebih bersifat umum dan menyangkut berbagai aspek dalam pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan.

Camat pulah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di kecamatan.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang kordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintahan di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya di wilayah kecamatan.

Perubahan pengertian kecamatan sebagaimana dikemukakan di atas membawa konsekuensi pada perubahan kedudukan camat sebagai pimpinan organisasi kecamatan. Camat sebagai perangkat daerah yang bertugas memberikan pelayanan tertentu, yang tidak lagi berkewajiban untuk ikut

menjalankan sebagian tugas/kewenangan kabupaten/kota. Camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Besar kecilnya fungsi dan peran camat akan sangat tergantung seberapa besar Delegasi kewenangan yang diberikan oleh bupati/walikota kepadanya.

Berkaitan dengan kecamatan secara faktual keberadaan kecamatan sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan pada masyarakat dan terutama dalam memeberikan pelayanan kepada masyarakat (public service).

Camat dalam organisasi kecamatan merupakan perangkat daerah yang khas dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perangkat daerah maupun organisasi pemerintahan daerah lainnya. Camat di samping memimpin satu unit pemerintahan yang menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang multi sektoral juga melaksanakan tugas-tugas kewilayahan (teritorial) karena memiliki wilayah kerja. Dengan demikian camat diharapkan memiliki kemampuan sebagai generasi sekaligus spesialis. Tuntutan untuk menjadi pejabat generalis karena camat melaksanakan urusan pemerintahan, yang melingkupi semua bidang urusan pemerintahan sepanjang mendapat pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota. Camat memerlukan kemampuan spesialis karna bidangnya urusan pemerintahan yang diterimanya memerlukan penguasaan serta spesialis dalam pembinaan wilayah kerja yang memiliki dinamika dan kompleksitas masalah yang luas.

Sebagai suatu organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat yang penuh dinamika, kecamatan menghadapi banyak permasalahan. Sebagai organisasi administrasi, maka masalah yang dihadapi juga lebih banyak bersifat manajerial dibandingkan dengan masalah yang bersifat politis. Termasuk juga mekanisme dan prosedur serta sarana dan prasarana berdasarkan hal tersebut maka diperlukan sebuah kinerja yang profesional, intensif dan optimal. Dengan pengetahuan dan ketrampilan khusus yang dimiliki oleh aparatur dalam hal ini camat memungkinkan terpenuhinya kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional Artinya keahlian dan kemampuan camat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Dimana suatu organisasi berupaya untuk memberikan pelayanan publik secara prima maka organisasi tersebut harus memiliki profesionalisme terhadap tujuan yang ingin dicapai peneliti untuk meneliti dari permasalahan, tentang profesionalisme camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan nabire barat kabupaten nabire provinsi papua.

Tinjauan Pustaka

Istilah Profesionalisme Menurut Siagian (dalam Kurniawan,2010), Profesionalisme adalah keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu yang baik, waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelagan atau masyarakat.

Dalam keseharian Profesionalisme dipahami sebagai cara bekerja secara profesional, menguasai

bidang kerja, kreatif dan inovatif untuk menghasilkan kinerja yang tinggi.

Dari bebrbagai teori tentang profesionalisme maka penulis menggunakan teorinya Tjokrowinoto (1996:191) dalam bukunya Hesel Nogis S. Tangkilisan (2009:226) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan profesionalisme adalah kemampuan untuk merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan fungsinya secara efisien, inovatif, lentur, dan mempunyai etos kerja tinggi.

Dari Konsep yang ditawarkan oleh para Ahli diatas maka penulis menarik Kesimpulan bahwa Profesionalisme merupakan sebuah sikap kepemimpinan dan keahlian dari seorang pemimpin yang berorientasi terhadap pencapaian kinerja yang efektif dengan berlandaskan pada sebuah regulasi.

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilaya kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Camat adalah kepala pemerintah kecamatan yang berada di bawa dan bertanggung jawab kepada gubernur, bupati/walikota, oleh karena itu camat memiliki tugas. Menurut Bayu Suryaningrat dalam R Suawah (2013:22). Camat adalah seseorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Camat juga seorang eksekutif yaitu seorang pelaksana tugas pemerintahan, seperti salah satu tugas dan fungsinya sebagai kepala wilayah kecamatan yaitu pengendalian pembangunan.

Menurut Abraham Lincoln dalam bukunya Nurul (2017:15) prinsip utama Pemerintahan yang demokratis adalah: (Government, of the people, by the people, and for the people) artinya harus dapat mandat dari rakyat, sesungguhnya merupakan wakil rakyat, dan apapun yang dikerjakan untuk kepentingan rakyat dengan demikian, maka prinsip-prinsip itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1 Freedom/Equalit, Adanya kebebasan dalam arti luas maupun sempit, dan atau adanya kesetaraan.
- 2 People's sovereignty Artinya adanya kedaulatan rakya

Sarjana hukum indonesia terkenal, Prof. R. Djokosutono, SH dalam bukunya Ceistina (2015:17). Mengatakan bahwa, negara dapat pula diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia, yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Pemerintahan ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingna rakyat untuk mencapai tujuan organisasi negara, antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib,keadilan, kesehatan dan lain-lain. Untuk dapat bertindak dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah mempunyai wewenang-wewenang mana dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan negara, agar tiap sektor tujuan negara dapat bersamaan dikerjakan.

Menurut beberapa sarjana, maka sebagai dasar pemerintahan adalah kitab suci (injil) atau de Heilige Schrift dimana segala sesuatu disalurkan menurut kehendak Tuhan. Pendapat demikian, samapai zaman baru ini, pendapat tentang pemerintahan yang berdasarkan kitab suci itu tetap dipertahankan kebenarannya kebenarannya oleh sarjana hukum dan

negarawan bangsa Jerman yang bernama Friedrich Julius Stahl dalam Cristin (2015:18).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, dimana data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologi yang mengutamakan penghayatan (versthen). Serta memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situwasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Responden dalam metode kualitatif berkembang terus (snowball) secara bertujuan (purposive) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan. Alat pengumpulan data atau instrument peneliti dalam metode kualitatif ialah si peneliti sendiri. Jadi, peneliti merupakan human instrument, dalam mengumpulkan data peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif. Tekni pengumpulan data yang sering digunakan ialah observasi partisipasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Husaini dan Purnomo,(2017:121) metode penelitian sosial.

Penelitian ini difokuskan pada Profesionalisme Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang dapat dikaji melalui:

1. Merencanakan penyelenggaraan pemerintahan
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Melaksanakan fungsinya secara efisien, giat, rajin dan serius dalam menjalankan tugas

Agar dapat mengumpulkan informasi dari objek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati dilakukan pemilihan terhadap unsur-

unsur masyarakat yang ada secara purposive sebagai informasi. Purposive artinya sampel di ambil berdasarkan pertimbangan subjektif penelitian. Pemilihan di dasarkan pada pertimbangan bahwa informasi memiliki pemahaman tentang fenomena penelitian. Berikut ini informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Camat
- b. Perangkat Kecamatan 3 Orang
- c. Kepala Desa 2 orang
- d. Toko adat 1 orang
- e. Toko Agama 1 orang
- f. Toko Masyarakat 1 orang
- g. Masyarakat 2 Orang
- h. LPM 1 orang

Hasil Penelitian

Profesionalisme kerja adalah suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang dan tingkatan masing-masing secara tepat waktu dan cermat. Profesionalisme menyangkut kecocokan antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas.

Dalam penelitian mengenai profesionalisme Camat, peneliti menggunakan empat aspek untuk mengkaji bagaimana profesionalisme yang dimiliki oleh camat yaitu merencanakan penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan fungsinya secara efisien, giat, rajin dan serius dalam menjalankan tugas pegawai yang dimana keempat indikator tersebut diuraikan kedalam beberapa pertanyaan yang disebar kepada responden.

Untuk melihat apakah Camat memiliki keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

sebagai pelayan masyarakat, diperoleh informasi bahwa camat memang benar sudah memiliki keterampilan yang seharusnya keterampilan ini sudah dimiliki oleh setiap aparatur Negara terlebih camat, karena sebagai pemimpin harus mampu dan memiliki keterampilan namun pada kenyataannya di lapangan camat kurang aktif dalam menjaankan tugas-tugas pokok di kecamatan sehingga pencapaian organisasi tidak terwujud secara efektif dan efisien.

Dalam hal menganalisa dan membaca suatu masalah yang timbul dalam tugas/pekerjaannya, Camat atau kepala Kecamatan Nabire Barat kurang mampu menganalisa dan membaca dengan baik masalah yang timbul di kecamatan baik dari dalam maupun luar karena kurangnya kedekatan antara camat dan pegawai di kantor kecamatann. Hal tersebut sesuai dengan jawaban informan. Sejalan dengan hal tersebut, pegawai atau staf yang ada pada Kantor Kecamatan Nabire Barat juga memberikan pendapat yang sama.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dianalisa bahwa Camat tidak Profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggaraan pemerintahan khususnya di kecamatan nabire barat kabupaten nabire. Terutama dalam hal membaca serta menyelesaikan masalah yang timbul dalam pekerjaannya secara cepat dan cermat.

Melaksanakan dengan baik merupakan salah satu aspek profesionalisme kerja yang dimiliki oleh camat. Untuk melihat bagaimana camat melaksanakan perintah dari pimpinan maka peneliti mengkaji lebih jauh kepada informan, dan diperoleh informasi bahwa camat selalu kurang melaksanakan dengan baik perintah

yang diberikan oleh pimpinannya, lebih sering diserikan kepada sekertaris camat.

Memiliki hubungan yang baik dengan pegawai atau staf yang dipimpinnya juga dapat mendorong terciptanya profesionalisme kerja dari camat, untuk melihat bagaimana hubungan yang ada diantara camat dan pegawai berdasarkan jawaban informan terlihat bahwa camat memiliki hubungan yang kurang baik dengan sesama pegawai yang ada.

Selanjutnya apakah kepala kecamatan memiliki integritas dalam melaksanakan tugas/pekerjaannya, berdasarkan jawaban responden mengenai hal tersebut terlihat bahwa camat memiliki integritas nsmun kurang baik dalam mengerjakan tugas/pekerjaannya. Ketiga hal diatas (kurang melaksanakan perintah pimpinan dengan baik, kurang memiliki hubungan yang baik serta tidak memiliki integritas) menunjukkan bahwa camat tidak memiliki loyalitas yang baik terhadap lembaga dan tugas/pekerjaannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa camat kurang profesionalisme. Profesionalisme aparatur sipil Negara dalam hal ini Camat Nabire Barat sangat ditentukan oleh setiap kemampuan dalam bekerja, dimana dengan tingkat kemampuan yang tinggi akan membuat suatu organisasi dapat mencapai tujuannya dan dapat meningkatkan kualitas kerja.

Meningkatkan kualitas kerja harus diimbangi dengan kompetensi yang memiliki pengertian yang sama dengan kemampuan, seseorang yang kompeten adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian untuk melakukan sesuatu secara efisien dan efektif.

Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki posisi yang

sangat strategis, karena kelancaran penyelenggaraan pemerintahan sangat tergantung kepada kompetensi yang dimiliki dan dikuasai camat dalam pelayanan kepada masyarakat, maka dari itu camat dituntut untuk memiliki kompetensi agar supaya setiap tugas, fungsi, dan tanggung jawab mampu dilaksanakan dalam hal pelaksanaan tugas pekerjaan, dengan kompetensi yang dimiliki oleh camat jika mampu menyelesaikan setiap tugas yang diberikan dengan tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran dengan menggunakan keahlian dan keterampilannya.

Dengan begitu maka kualitas kerja pun akan meningkat, kualitas kerja camat dapat dilihat ketika camat dapat mengerjakan dan menyelesaikan setiap tugas dan untuk menciptakan kualitas yang baik maka diperlukan disiplin kerja yang baik pula.

Dengan adanya disiplin kerja yang baik maka camat akan mematuhi setiap peraturan yang ada mulai dari jam masuk kerja, melaksanakan tugas dan pulang sesuai dengan ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat lain bukan karena dinas, dan apabila terlaksana dengan baik akan menjadikan perilaku yang disiplin, dan membuat setiap pekerjaan daripada aparatur menjadi lebih terarah dalam meningkatkan kualitas kerja.

Efektivitas kerja yang dalam hal ini terdiri dari : kuantitas kerja, kualitas kerja, dan waktu pekerjaan yang dimiliki camat dimana efektifitas juga digunakan untuk mengukur keberhasilan yang dicapai oleh organisasi. Untuk melaksanakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi harus didukung pula dengan sumber daya manusia yang memadai yakni kemampuan, keahlian dan

keterampilan. Efektif tidaknya suatu program dinilai dari kemampuan sumber daya manusia yang menjalankannya, jika aparatur yang menjalankannya memiliki kemampuan yang baik maka setiap pekerjaan dan program yang ada akan mudah mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Maka dari itu camat harus memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan tuntutan kerja, efektivitas kerja diukur berdasarkan keterampilan kerja, disiplin kerja dan kemampuan aparatur dalam melakukan setiap pekerjaannya. Karena dengan keterampilan kerja akan menunjukkan kemampuan dan keahlian aparatur dalam pelaksanaan tugas. Efektifnya setiap tugas yang diberikan menghasilkan kualitas kerja maka dengan kualitas kerja mampu mencapai setiap tujuan organisasi.

Tanggung jawab merupakan kesanggupan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. Setiap aparatur wajib memiliki sikap tanggung jawab tidak terkecuali camat karena dengan tanggung jawab maka aparatur akan selalu melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya dan dengan tanggung jawab maka setiap aparatur tidak akan mengutamakan kepentingan diri sendiri, orang lain, atau golongan.

Maka dari itu pentingnya sikap tanggung jawab oleh camat agar setiap pekerjaan yang dilakukan terlaksana dengan baik serta tidak akan melemparkan kesalahan yang dibuatnya kepada orang lain, namun berani

memikul resiko dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya. Maka camat harus mempunyai sikap tanggung jawab dimana dengan tanggung jawab aparatur akan merasa setiap pekerjaan yang diberikan atau diembankan adalah penting dan harus diselesaikan dengan baik, dengan adanya sikap tanggung jawab membuat camat mempunyai kesadaran akan setiap tugas dan fungsinya.

Kesimpulan

1. Kemampuan camat untuk merencanakan kegiatan pemerintahan sesuai standar yang berlaku yaitu melaksanakan perencanaan berdasarkan rancangan yang sudah ada, dan setelah itu dimasukkan dalam dokumen program kerja kecamatan Nabire Barat, namun camat kurang mampu merealisasikan atau menjalankan rancangan atau program-program pemerintahan dikecamatan dengan baik. Sehingga banyak keterlambatan pengurusan administrasi di kantor kecamatan.
2. Mengkoordinasikan kegiatan kemasyarakatan, dilakukan setiap dua bulan bahkan tiga bulan, baik ditingkat kabupaten, maupun koordinasi yang dilakukan bersama dengan para kepala kampung, kegiatan pemberdayaan yang sudah dilakukan hanyalah kegiatan yang sifatnya bantuan dari pemerintah kabupaten, sedangkan camat sendiri belum mempunyai program dan anggaran tersendiri untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Etos kerja tinggi merupakan sebuah sikap yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik secara vertical maupun horizontal.

4. Profesionalisme camat dilihat juga dari tanggung jawab yang diembankan kepadanya, camat diharapkan mampu melaksanakan setiap tugas yang diembankan kepadanya dengan baik, merupakan bentuk tanggung jawab kepada daerah.

Saran

1. Perlunya meningkatkan kemampuan camat dalam menjalankan tugas pemerintahan di kecamatan, bukan hanya melalui kegiatan musyawarah yang dilakukan secara formal, tetapi juga dilakukan secara non formal seperti melakukan kunjungan kepada masyarakat untuk mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang dapat dilakukan oleh pemerintah kecamatan sebagai bagian tanggung jawab pemerintah kecamatan.
2. Perlu dilakukan kegiatan koordinasi untuk pemberdayaan masyarakat, bukan hanya dengan kepala kampung, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat kampung seperti Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, organisasi keaman, untuk meningkatkan keamanan di kecamatan dan bentuk kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan.
3. Perlu adanya peningkatan kemampuan camat dalam melihat masla-masla yang muncul di ruwang lingkup kecamatan, selaiin itu juga perlu meningkatkan kemampuan camat dalam menjalankan suawatu tugas dengan waktu yg tepat.
4. Perlu meningkatkan kemampuan camat dalam menjalakan tugas-tugas yang diberikan, kurangnya rasa tanggung jawab camat membuat

banyak pengurusan penyelenggaraan pemerintah tidak berjalan dengan baik, sehingga camat harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. 2012. *Kepemimpinan Transformasi Dalam Birokrasi Pemerintahan*. Jakarta: PT.Multicerdas Publishing.
- Cristina, S.T. Kansil. 2015. *Sistim Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hessel, N. S. Tangkilisan. 2009. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Husaini, Purnomo. 2017. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Makhya, Syarif. 2011. *Ilmu Pemerintahan (Telaah Awal)*. Bandar Lampung Universitas Lamoung
- Pramosito, Agus E.A.P. 2009. *Reformasi Birokrasi Kepemimpinan dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava media.
- Puspito, H. dan Kurniawan, J.L.K. 2012. *Filosofi Pelayanan Publik*. Jaringan Nasional. Malang: Cv.MP3.
- Purwono. 2013. *Profesi Pustakawan Menghadapi Tantangan Perubahan*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governace*. Bandung: Cv.Mandar Maju Sumpersari Indah.
- Sjafri, Sairin. 2010. *Membangun Profesionalisme Muhammadiyah*. Yogyakarta: PT Nusa Bakti
- Widjaja, Haw. 2017. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*.

EKSEKUTIF

ISSN : 2337 - 5736

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan

Volume 3 No. 3 Tahun 2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Jakarta: PT Raja Grafarindo

Persada.



*Sekretariat:
Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*